



**BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
POLA KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan arsip serta untuk meningkatkan penataan arsip secara tepat, cepat, dan sistematis perlu diatur pola klasifikasi arsip di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

5. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 143);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Non Keuangan dan Non Kepegawaian;
7. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 228);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 622);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

Pasal 1

- (1) Pola Klasifikasi Arsip di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pola Klasifikasi Arsip merupakan pola pengaturan fisik dan informasi arsip di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengelompokkan arsip secara sistematis, terstruktur, dan efektif berdasarkan subjek dan perihal atau masalah, yang diidentifikasi dalam bentuk kode berupa gabungan huruf dan angka.
- (2) Pola Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

Pasal 2

Pola Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan, penataan, dan penemuan kembali arsip secara cepat, tepat, mudah, dan sistematis.

Pasal 3

Klasifikasi Arsip dikelompokkan berdasarkan sifat permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang terdiri atas:

- a. klasifikasi substantif; dan
- b. klasifikasi fasilitatif.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan klasifikasi yang berkaitan dengan tugas pokok.
- (2) Klasifikasi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan klasifikasi yang berkaitan dengan tugas penunjang.

Pasal 5

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur:

- a. induk masalah;
- b. pokok masalah; dan
- c. sub pokok masalah.

Pasal 6

- (1) Induk masalah diberi kode huruf yang mengandung arti singkatan atau kependekan penyebutan induk masalah yang ditempatkan pada bagian pertama susunan kode.
- (2) Pokok masalah diberi kode angka secara berurutan dari 01, 02, 03, 04, dan seterusnya yang ditempatkan pada bagian kedua susunan kode.
- (3) Sub pokok masalah diberi kode angka secara berurutan dari 01, 02, 03, dan seterusnya yang diawali dengan 2 (dua) angka di depannya sesuai dengan pokok masalah yang ditempatkan pada bagian ketiga susunan kode.

Pasal 7

- (1) Induk Masalah pada Klasifikasi substantif meliputi:
 - a. Hukum (HK);
 - b. Pengawasan Pemilu (PM);
 - c. Hubungan Masyarakat (HM); dan
 - d. Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu(PP);
- (2) Induk masalah pada klasifikasi fasilitatif meliputi:
 - a. Kepegawaian (KP);
 - b. Keuangan (KU);
 - c. Ketatausahaan (TU);
 - d. Organisasi dan Tata Laksana (OT);
 - e. Perlengkapan (PL);
 - f. Perencanaan (PR);
 - g. Kerumahtanggaan (RT);
 - h. Pengawasan (PW); dan
 - i. Teknologi Informasi (TI).

Pasal 8

Jika dalam pelaksanaan terdapat pokok masalah atau sub pokok masalah yang belum diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini, unit kerja dapat menambah pokok masalah atau sub pokok masalah dengan memberikan kode angka sebagai kelanjutan dari nomor terakhir dari tiap pokok masalah dan sub pokok masalah yang bersangkutan.

Pasal 9

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 2015

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 25 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1427

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM

POLA KLASIFIKASI ARSIP

A. KODE MASALAH DAN POKOK MASALAH

1. FUNGSI SUBSTANTIF

HK. HUKUM

00 Program Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program Perencanaan Pembentukan Peraturan BAWASLU dan program Perencanaan Pembentukan Peraturan DKPP.

01 Produk Hukum

01.00 Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur seperti peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, instruksi, prosedur tetap (protap) atau prosedur operasional standar, surat edaran di bidang kearsipan mulai dari persiapan, analisa, penyusunan, pengkoordinasian, perumusan, dan pembahasan, sampai dengan pengesahannya.

01.01 Produk Hukum yang Bersifat Penetapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan (keputusan), yaitu keputusan tentang penetapan kegiatan dan keputusan tentang penetapan pelaksana kegiatan di bidang kearsipan sejak awal proses hingga penandatanganan.

02 Perjanjian Kerjasama

02.00 Kerjasama Dalam Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama dalam negeri mulai dari persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama.

02.01 Kerjasama Luar Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama luar negeri mulai dari persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama.

03 Bantuan Hukum

03.00 Bantuan Hukum Kasus Perdata

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan

pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum perdata di bidang kearsipan.

- 03.01 Bantuan Hukum Kasus Pidana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum pidana di bidang kearsipan.
- 03.02 Bantuan Hukum Kasus Peradilan Tata Usaha Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum TUN di bidang kearsipan.
- 04 Telaah Hukum
 - 04.00 Telaah Hukum Internal
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk internal BAWASLU.
 - 04.01 Telaah Hukum Eksternal
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk eksternal BAWASLU.
- 05 Sosialisasi Hukum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi hukum dan penyebarluasan peraturan dan instrumen hukum kepada lembaga maupun perorangan.
- 06 Dokumentasi Hukum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum, perluasan, dan penyebaran informasi hukum.
- 07 Hak Atas Kekayaan Intelektual
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pengurusan masalah HAKI sampai dengan penyelesaian masalah HAKI.
- 08 Kasus Hukum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus hukum baik hukum pidana, perdata, dan peradilan tata usaha oleh BAWASLU.

PM. PENGAWASAN PEMILU

- 00 Teknis Pengawasan Pemilu
 - 00.00 Teknis Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Teknis Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat yang meliputi Indeks Kerawanan Pemilu, Teknis Pengawas Pemilu Tingkat Pusat, Kalender Pengawasan Tingkat Pusat, dan Jurnal Pengawasan Tingkat Pusat.
 - 00.01 Teknis Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Teknis Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi yang meliputi

Indeks Kerawanan Pemilu, Teknis Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi, Kalender Pengawasan Tingkat Provinsi, dan Jurnal Pengawasan Tingkat Provinsi.

- 00.02 Teknis Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Teknis Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota yang meliputi Indeks Kerawanan Pemilu, Teknis Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota, Kalender Pengawasan Tingkat Kabupaten/Kota, dan Jurnal Pengawasan Tingkat Kabupaten/Kota.
- 01 Sosialisasi Pengawasan Pemilu
 - 01.00 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat.
 - 01.01 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi.
 - 01.02 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota.
- 02 Kerjasama Pengawasan Pemilu
- 03 Partisipasi Masyarakat
- 04 Analisis Teknis Pengawasan Pemilu dan Potensi Pelanggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis teknis pengawasan pemilu dan potensi pelanggaran.
- 05 Penanganan Temuan/Laporan Pelanggaran
 - 05.00 Penanganan Tingkat Pusat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan Temuan Pelanggaran Tingkat Pusat.
 - 05.01 Penanganan Tingkat Provinsi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan Temuan Pelanggaran Tingkat Provinsi.
 - 05.02 Penanganan Tingkat Kabupaten/Kota
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan Temuan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota.
- 06 Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu
 - 06.00 Penanganan Tingkat Pusat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu Tingkat Pusat.
 - 06.01 Penanganan Tingkat Provinsi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu Tingkat Provinsi.
 - 06.02 Penanganan Tingkat Kabupaten/Kota
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan

Laporan Pelanggaran Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota.

- 07 Penyelesaian Sengketa Pemilu
 - 07.00 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Pusat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Pusat.
 - 07.01 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Provinsi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Provinsi.
 - 07.02 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota.

HM. HUBUNGAN MASYARAKAT

- 00 Penerangan dan Publikasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerangan terhadap masyarakat di bidang kearsipan dan non kearsipan melalui kegiatan publikasi seperti wawancara, wartawan, konferensi pers/ press realese, media masa (televisi, radio, surat kabar), dan tanggapan terhadap berita media massa, termasuk layanan informasi publik.
- 01 Dengar pendapat/ *hearing* DPR
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dengar pendapat/ *hearing* dengan DPR.
- 02 Hubungan Antar Lembaga
 - 02.00 Lembaga Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah.
 - 02.01 Organisasi Kearsipan Nasional dan Internasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi-organisasi kearsipan.
 - 02.02 Perusahaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan pihak perusahaan (Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta).
 - 02.03 Organisasi Kemasyarakatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan organisasi kemasyarakatan.
 - 02.04 Perguruan Tinggi/ Sekolah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan perguruan tinggi/ sekolah termasuk orientasi lapangan dan praktek kerja lapangan (PKL).
 - 02.05 Bakohumas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan (Bakohumas).

03 Keprotokolan

03.00 Upacara/ Acara Kedinasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, upacara serah terima jabatan.

03.01 Kunjungan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri dan kunjungan dari masyarakat.

03.02 Agenda Pimpinan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pelaksanaan agenda pimpinan seperti agenda rapat pimpinan.

04 Dokumentasi dan Penerbitan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi (pemotretan dan *shooting*) dan penerbitan buletin/majalah/jurnal/naskah sumber, mulai dari perencanaan sampai penyebaran.

05 Penghargaan/ Tanda Kenang-kenangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan serta kenang-kenangan kepada instansi atau organisasi serta perorangan yang memiliki jasa atau prestasi di bidang kearsipan.

06 Ucapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian ucapan selamat, ucapan terima kasih, ucapan bela sungkawa, dan ucapan permohonan maaf.

07 Dokumen Hosting

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan web site.

PP. PERKARA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU

00 Perkara Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penanganan Perkara Dugaan Pelanggaran KEPP yang meliputi Registrasi Pengaduan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Materil, Registrasi Perkara, Resume Perkara, Penetapan Majelis Sidang, Pelimpahan dan Penerimaan Berkas Perkara, Pemanggilan Sidang, Risalah Sidang, dan Putusan.

01 Penanganan Pengaduan/Laporan yang Tidak Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penanganan Pengaduan/Laporan Dugaan Pelanggaran KEPP yang meliputi Registrasi Pengaduan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Materil,

dan Resume Pengaduan.

- 02 Sosialisasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran KEPP.

2. FUNGSI FASILITATIF

KP. KEPEGAWAIAN

- 00 Formasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pengadaan calon pegawai, mulai dari pengumpulan bahan untuk penyusunan rencana formasi, termasuk rencana penempatan pegawai dan rencana penetapan klasifikasi pendidikan sampai dengan persetujuan formasi.
- 01 Pengadaan
- 01.00 Penerimaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, test sampai dengan pengumuman penerimaan.
 - 01.01 Pengangkatan CPNS dan PNS
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan CPNS, pengangkatan CPNS menjadi PNS mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai dengan pengangkatan.
 - 01.02 Prajabatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan prajabatan.
 - 01.03 Penempatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penempatan CPNS dan PNS di unit-unit kerja.
- 02 Ujian Kenaikan Pangkat/ Jabatan
- 02.00 Ujian Penyesuaian Ijazah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS.
 - 02.01 Ujian Dinas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dinas bagi PNS.
 - 02.02 Ujian Kompetensi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian kompetensi untuk kenaikan jabatan.
- 03 Mutasi
- 03.00 Kenaikan Pangkat/ Golongan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/ golongan pegawai.

- 03.01 Kenaikan Gaji Berkala
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala pegawai.
- 03.02 Penyesuaian Masa Kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji.
- 03.03 Penyesuaian Tunjangan Keluarga
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyesuaian tunjangan keluarga.
- 03.04 Penyesuaian Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyesuaian Tunjangan Arsip Statis.
- 03.05 Promosi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan promosi jabatan.
- 03.06 Rotasi Kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rotasi kerja dalam rangka pemantapan tugas.
- 03.07 Alih Tugas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas seperti mutasi antar instansi, pegawai yang dipekerjakan, pegawai yang diperbantukan.
- 04 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan
 - 04.00 Pengangkatan Jabatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural maupun fungsional termasuk di dalamnya pelantikan.
 - 04.01 Pemberhentian Jabatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dari jabatan struktural maupun fungsional.
- 05 Pendelegasian Wewenang
 - 05.00 Pelaksana Tugas (Plt)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan apabila pejabat definitifnya belum dilantik.
 - 05.01 Pelaksana Harian (Plh)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitif tidak dapat menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, sakit, mengikuti pendidikan dan pelatihan).
- 06 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
 - 06.00 Program Diploma
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan diploma mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan

program diploma.

- 06.01 Program Sarjana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan sarjana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program sarjana.
- 06.02 Program Pasca Sarjana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan pasca sarjana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program pasca sarjana.
- 06.03 Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan penjenjangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan diklat penjenjangan pegawai dari tingkat eselon I sampai dengan tingkat eselon IV.
- 06.04 Kursus/ Diklat Fungsional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/ diklat fungsional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kursus/ diklat fungsional.
- 06.05 Kursus/ Diklat Teknis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/ diklat teknis mulai dari perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kursus/ diklat teknis.
- 07 Administrasi Pegawai
 - 07.00 Data/ Keterangan Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai termasuk presensi pegawai.
 - 07.01 Kartu Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai.
 - 07.02 Karis/ Karsu
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu).
 - 07.03 Kartu Taspen
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu Taspen.
 - 07.04 Kartu Askes
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan tentang Askes.
 - 07.05 Tanda Jasa
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda jasa kepada pegawai BAWASLU.

08 Pembinaan Pegawai

- 08.00 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).
- 08.01 SKP (Satuan Kinerja Pegawai)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai.
- 08.02 Pembinaan Mental
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan mental pegawai termasuk didalamnya ceramah keagamaan.
- 08.03 Hukuman Disiplin
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemberian hukuman disiplin pegawai yang meliputi teguran lisan/ tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan/ penurunan pangkat/ golongan dan pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.

09 Pembinaan Jabatan Fungsional

- 09.00 Jabatan Fungsional Arsiparis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Arsiparis, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.
- 09.01 Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional analisis kepegawaian, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.
- 09.02 Jabatan Fungsional Widyaiswara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional widyaiswara, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.
- 09.03 Jabatan Fungsional Peneliti
Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional peneliti, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.
- 09.04 Jabatan Fungsional Perencana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional perencana, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.
- 09.05 Jabatan Fungsional Perancang Undang-Undang
Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional perancang Undang-undang, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit

sampai pemberian tunjangan jabatan.

- 09.06 Jabatan Fungsional Auditor
Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional auditor, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.
- 09.07 Jabatan Fungsional Pustakawan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional pustakawan, sejak usul pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan.
- 09.08 Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional pranata komputer, sejak usul pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan.
- 09.09 Jabatan fungsional Pranata Humas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional pranata humas, sejak usul pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan.
- 09.10 Jabatan Fungsional Konservator
Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional konservator, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.
- 09.11 Jabatan Fungsional Lainnya
Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional lainnya, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.

10 Kesejahteraan

- 10.00 Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan pegawai, *general check up* pejabat.
- 10.01 Cuti
Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak cuti pegawai yang meliputi cuti tahunan, cuti bersalin, cuti besar, dan cuti di luar tanggungan negara.
- 10.02 Rekreasi/ Kesenian/ Olahraga
Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekreasi, kesenian, dan olahraga.
- 10.03 Bantuan Sosial
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk di dalamnya bantuan sosial yang diberikan oleh atau kepada pihak lain, sumbangan-sumbangan lainnya.

- 10.04 Perumahan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumahan pegawai BAWASLU.
- 11 Pemberhentian Pegawai
 - 11.00 Dengan Hormat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dengan hormat, baik atas permintaan sendiri atau bukan atas permintaan sendiri, baik dengan hak pensiun maupun tidak, mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya SK pensiun termasuk didalamnya pensiun/ duda/ janda/ anak dan Taspen.
 - 11.01 Tidak Dengan Hormat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, mulai dari pengajuan, proses pemberhentian sampai dikeluarkannya SK pemberhentian.
- 12 Organisasi Non Kedinasan
 - 12.00 KORPRI
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi KORPRI BAWASLU.
 - 12.01 Dharma Wanita
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dharma wanita BAWASLU.
 - 12.02 Koperasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan koperasi BAWASLU.
 - 12.03 Yayasan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan BAWASLU.
 - 12.04 Asosiasi Arsiparis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi Asosiasi Arsiparis.
 - 12.05 Lain-lain
Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi non kedinasan lainnya.

KU. KEUANGAN

- 00 Pelaksanaan Anggaran
 - 00.00 DIPA/ POK
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran yang berupa penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), maupun revisi DIPA/ POK.
 - 00.01 RAB
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan

pengajuan Rencana Anggaran Belanja.

- 00.02 Penggajian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran berupa penggajian kepada pegawai, termasuk daftar gaji pegawai dan bukti pembayarannya.
 - 00.03 Pengeluaran Anggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pengeluaran, mulai dari SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang), SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan), SPP-TUP (Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan), Surat Kuasa sampai Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), juklak/ mekanisme pengelolaan APBN serta Bahan Nota Keuangan.
- 01 Pengelolaan Perbendaharaan
- 01.00 Perbendaharaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa Surat Keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara pengeluaran dan Bendahara penerimaan.
 - 01.01 KP4 (Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa KP4 yaitu surat keterangan untuk Mendapat Tunjangan Keluarga dan Surat Keterangan lainnya.
 - 01.02 Kartu Pengawasan Kredit
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa kartu pengawasan kredit anggaran.
 - 01.03 Pajak
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan Surat Setoran Pajak (SSP).
 - 01.04 Penerimaan Non Pajak
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan penyetoran non pajak melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara.
 - 01.05 Pengembalian Belanja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembalian belanja, berupa pengembalian belanja pegawai, barang, modal melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).

- 01.06 Berita Acara Pemeriksaan Kas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa berita acara pemeriksaan kas.
 - 01.07 Verifikasi Anggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/ penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/ pengeluaran anggaran.
 - 01.08 Pembukuan Anggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan anggaran yang berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP) dan kartu-kartu realisasi anggaran dan kartu pengawasan realisasi anggaran.
- 02 Perhitungan Anggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan anggaran berupa: laporan keuangan, LRA, neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
- 03 Ketatausahaan Keuangan
- 03.00 Keterangan Penghasilan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa keterangan penghasilan perorangan.
 - 03.01 SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran).
 - 03.02 Permohonan Pinjaman
Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketatausahaan keuangan yang berupa permohonan pinjaman.
 - 03.03 Iuran Keanggotaan Organisasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan iuran keanggotaan dalam organisasi baik tingkat nasional maupun internasional mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran anggota sampai laporan.

TU. KETATAUSAHAAN

00 Persuratan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/ pengelolaan surat masuk dan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahannya, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/ stempel, dan pengiriman surat/ barang cetakan.

00.00 Pengurusan Surat Masuk

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat masuk.

- 00.01 Pengurusan Surat Keluar
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat keluar.
- 01 Penggandaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggandaan dalam rangka kedinasan di lingkungan BAWASLU.
- 02 Kearsipan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kearsipan dinamis di lingkungan BAWASLU.
- 02.00 Pembinaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kearsipan dinamis meliputi penilaian angka kredit arsiparis tingkat instansi, lomba tertib arsip, penilaian arsiparis berprestasi, dan bimbingan teknis.
- 02.01 Penyusunan Sistem
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sistem kearsipan dinamis, meliputi juklak-juklak dan JRA.
- 02.02 Pemindahan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip.
- 02.03 Pemusnahan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip.
- 02.04 Penyerahan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip.
- 03 Rapat/ Rakor/ Rakernis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan rapat, baik rapat pimpinan, rapat koordinasi, maupun rapat kerja teknis internal Badan Pengawas Pemilihan Umum, termasuk di dalamnya notulen dan hasil pembahasannya.

OT. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

- 00 Organisasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perubahan organisasi yang meliputi analisis, evaluasi, dan perumusan organisasi.
- 01 Uraian Tugas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan uraian tugas masing-masing unit kerja, jabatan struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum.
- 02 Analisis Jabatan dan Beban Kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis, evaluasi, rentang kendali jabatan, dan beban kerja.
- 03 Mekanisme Kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembuatan mekanisme

kerja yang meliputi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan tata kerja termasuk berkas reformasi birokrasi.

04 Ketatalaksanaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketatalaksanaan termasuk pembuatan pedoman hubungan kerja yang meliputi pola hubungan antar struktural, antar fungsional, dan antara struktural dengan fungsional.

PL. PERLENGKAPAN

00 Analisa Kebutuhan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan analisa kebutuhan dari unit kerja.

01 Tata Ruang

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaturan tata ruang kantor.

02 Daftar Perkenalan Mampu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perkenalan dan penawaran untuk menjadi rekanan BAWASLU.

03 Pengadaan

03.00 Alat Tulis Kantor

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan ATK dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima.

03.01 Perlengkapan Kantor

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan perlengkapan kantor seperti meja, kursi, lemari, rak filing kabinet, brankas, dan lain sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima.

03.02 Tanah dan Bangunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah dan bangunan kantor termasuk bukti kepemilikan asset/ kekayaan (sertifikat, IMB), dan rumah dinas dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

03.03 Kendaraan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan kendaraan dinas, baik kendaraan beroda dua atau beroda empat termasuk bukti kepemilikan (BPKP, STNK) dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

03.04 Instalasi/ Jaringan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan instalasi listrik, air, telepon, Local Area Network (LAN), dan sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

03.05 Peralatan Kearsipan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan peralatan kearsipan seperti perangkat laboratorium, boks, rak, film, dan lain lain dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima.

- 04 Penyimpanan/ pergudangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang dari gudang.
- 05 Distribusi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi barang untuk kepentingan intern maupun ekstern.
- 06 Pemeliharaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan kerusakan, perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi, perbaikan/ service kendaraan dinas serta kebersihan taman dan lingkungan kantor.
- 07 Inventarisasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi barang milik negara (BMN) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, termasuk buku inventaris.
- 08 Penghapusan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan barang sejak persiapan/ pembentukan panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian, pelelangan sampai pelaporan termasuk berita acaranya.

PR. PERENCANAAN

- 00 Usulan Perencanaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan perencanaan program kerja dari masing-masing unit kerja.
- 01 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan
- 01.00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
 - 01.01 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
- 02 Rencana Kerja Tahunan
- 02.00 Rencana Kerja Tahunan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tahunan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L), Rencana kerja Tahunan, Musrenbangnas, dan Rakorbangpus.
 - 02.01 Penetapan Kinerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja dengan atasan langsung seperti Eselon II dengan Eselon I, Eselon I dengan Ketua Bawaslu RI, Ketua Bawaslu RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).

03 Penyusunan Rencana Anggaran

03.00 Penyusunan Rencana Anggaran Arsip Nasional RI
Naskah-naskah yang berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran BAWASLU seperti Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan lembaga (RKAKL), Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional (PO), Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA), Pendapatan Negara Bukan Pajak/ PNBPN, Standar Biaya Khusus/SBK).

03.01 Revisi Dokumen Anggaran
Naskah-naskah yang berhubungan dengan revisi/ perubahan dokumen anggaran seperti revisi DIPA, PO.

04 Laporan

04.00 Laporan Berkala
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja yang disusun seperti (laporan triwulan, laporan tahunan) BAWASLU.

04.01 Laporan Khusus
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan khusus, antara lain adalah laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/ program tertentu seperti: Pidato Presiden, Rapat dengar pendapat dengan DPR RI.

04.02 *Progress Report*
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun).

04.03 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang dicapai oleh unit kerja atau lembaga berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak internal dan eksternal.

04.04 Evaluasi Kegiatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi kinerja berdasarkan kegiatan.

RT. KERUMAHTANGGAAN

00 Perjalanan Dinas Luar Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas ke luar negeri termasuk pengurusan *passport*, visa, dan tiket pesawat.

01 Fasilitas

01.00 Kendaraan Dinas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas, seperti: formulir permohonan penggunaan kendaraan dinas, laporan kehilangan kendaraan.

01.01 Ruang Rapat/ Konsumsi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan ruang rapat berikut sarana kelengkapan rapat termasuk penyediaan konsumsi dan administrasinya.

01.02 Telekomunikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan sarana telekomunikasi (telepon).

02 Pengamanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan lingkungan kantor seperti daftar piket satpam/*security*, buku/formulir tamu, pengaturan akses masuk lingkungan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan pengaturan perpakiran termasuk kartu parkir.

PW. PENGAWASAN

00 Audit

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit seperti audit operasional, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit BMN, serta kegiatan audit lainnya yang meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan.

01 Reviu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu atas pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan baik semesteran maupun tahunan, meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.

02 Evaluasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi atas suatu kegiatan seperti evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta evaluasi kegiatan lainnya meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan.

03 Pengaduan Masyarakat

03.00 Internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan-pengaduan masyarakat yang datang dari internal BAWASLU sampai dengan laporan penyelesaiannya.

03.01 Eksternal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan-pengaduan masyarakat yang datang dari eksternal BAWASLU sampai dengan laporan penyelesaiannya.

04 Pengawasan Melekat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan melekat, proses pemeriksaan pengawasan sampai dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, termasuk pakta integritas.

05 Laporan Hasil Pengawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) BAWASLU semesteran dan tahunan baik yang disampaikan ke Kementerian PAN dan RB, BPKP, dan UKP4, serta tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.

06 Pemantauan

06.00 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/ Program

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses penilaian kemajuan suatu program/ kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya kegiatan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan BAWASLU.

06.01 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/ Tuntutan Ganti Rugi (TGR) seperti: Laporan kehilangan, berita acara kehilangan barang/ uang, SK tanggung jawab mutlak/ surat kesanggupan untuk mengganti ke Kas Negara, SK penghapusan uang dan barang sampai laporan penyelesaian TP-TGR.

06.02 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemantauan LHP BPK RI, atau LHP lainnya yang ditindak lanjuti sampai dengan pelaporan.

06.03 Penerapan Early Warning System

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kepada unit kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sampai dengan laporan.

06.04 Pemantauan Disiplin Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan disiplin pegawai di Lingkungan BAWASLU sampai dengan laporan.

07 Kegiatan Pengawasan Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pengawasan, diklat pengawasan, bimbingan dan konsultasi pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, keikutsertaan dalam Forbes APIP dan forum komunikasi lainnya.

TI. TEKNOLOGI INFORMASI

- 00 Rencana Strategis/Master Plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM)
- 01 Dokumen Arsitektur
 - 01.00 Sistem Informasi.
 - 01.01 Sistem Aplikasi.
 - 01.02 Infrastruktur.
- 02 Dokumentasi Implementasi
 - 02.00 Sistem Informasi.
 - 02.01 Sistem Aplikasi.
 - 02.02 Infrastruktur.
- 03 Perekam dan Pemutakhiran Data
 - 03.00 Formulir Isian.
 - 03.01 Daftar Petugas Perekaman.
 - 03.02 Jadwal Pelaksanaan.
 - 03.03 Laporan Hasil Perekaman dan Pemutakhiran Data.
- 04 Migrasi Sistem Aplikasi dan Data
 - 04.00 Perencanaan Migrasi.
 - 04.01 Pelaksanaan Migrasi.
 - 04.02 Berita Acara Kegiatan Migrasi.
 - 04.03 Daftar Sistem Aplikasi dan Data yang Imigrasi.
- 05 Dokumen Hosting
 - 05.00 Formulir Permintaan Hosting.
 - 05.01 Laporan Hasil Uji Kelayakan.
 - 05.02 Laporan Pelaksanaan Hosting.
- 06 Layanan Back-up Data Digital

B. KODE SATUAN KERJA

1. PUSAT

- a. Ketua = BAWASLU
- b. Sekretaris Jenderal = SJ
 - 1) Biro Administrasi = ADM
 - 2) Biro Teknis Pengawasan Penyelenggara Pemilu = TP3
 - 3) Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal = H2PI
 - 4) Biro Administrasi DKPP = ADM.DKPP

2. DAERAH

DAERAH	KODE
a. PROVINSI ACEH	a. BAWASLU-PROV.AC
1) Kabupaten Aceh Barat	1) BAWASLU-PROV. AC-01
2) Kabupaten Aceh Barat Daya	2) BAWASLU-PROV. AC-02
3) Kabupaten Aceh Besar	3) BAWASLU-PROV. AC-03
4) Kabupaten Aceh Jaya	4) BAWASLU-PROV. AC-04
5) Kabupaten Aceh Selatan	5) BAWASLU-PROV. AC-05
6) Kabupaten Aceh Singkil	6) BAWASLU-PROV. AC-06
7) Kabupaten Aceh Tamiang	7) BAWASLU-PROV. AC-07
8) Kabupaten Aceh Tengah	8) BAWASLU-PROV. AC-08
9) Kabupaten Aceh Tenggara	9) BAWASLU-PROV. AC-09

DAERAH	KODE
10) Kabupaten Aceh Timur 11) Kabupaten Aceh Utara 12) Kabupaten Bener Meriah 13) Kabupaten Bireun 14) Kabupaten Gayo Lues 15) Kabupaten Nagan Raya 16) Kabupaten Pidie 17) Kabupaten Pidie Jaya 18) Kabupaten Simeulue 19) Kota Banda Aceh 20) Kota Subulussalam 21) Kota Langsa 22) Kota Lhokseumawe 23) Kota Sabang	10) BAWASLU-PROV. AC-10 11) BAWASLU-PROV. AC-11 12) BAWASLU-PROV. AC-12 13) BAWASLU-PROV. AC-13 14) BAWASLU-PROV. AC-14 15) BAWASLU-PROV. AC-15 16) BAWASLU-PROV. AC-16 17) BAWASLU-PROV. AC-17 18) BAWASLU-PROV. AC-18 19) BAWASLU-PROV. AC-19 20) BAWASLU-PROV. AC-20 21) BAWASLU-PROV. AC-21 22) BAWASLU-PROV. AC-22 23) BAWASLU-PROV. AC-23
b. PROVINSI SUMATERA UTARA 1) Kabupaten Asahan 2) Kabupaten Batubara 3) Kabupaten Dairi 4) Kabupaten Deli Serdang 5) Kabupaten Humbang Hasundutan 6) Kabupaten Karo 7) Kabupaten Labuhanbatu 8) Kabupaten Labuhanbatu Selatan 9) Kabupaten Labuhanbatu Utara 10) Kabupaten Langkat 11) Kabupaten Mandailing Natal 12) Kabupaten Nias 13) Kabupaten Nias Barat 14) Kabupaten Nias Selatan 15) Kabupaten Nias Utara 16) Kabupaten Padang Lawas 17) Kabupaten Padang Lawas Utara 18) Kabupaten Pakpak Bharat 19) Kabupaten Samosir 20) Kabupaten Serdang Bedag 21) Kabupaten Simalungun Raya 22) Kabupaten Tapanuli Selatan 23) Kabupaten Tapanuli Tengah 24) Kabupaten Tapanuli Utara 25) Kabupaten Toba Samosir 26) Kota Binjai 27) Kota Gunung Sitoli 28) Kota Medan 29) Kota Padangsidempuan 30) Kota Pematangsiantar 31) Kota Sibolga 32) Kota Tanjungbalai 33) Kota Tebing Tinggi	b. BAWASLU-PROV. SU 1) BAWASLU-PROV. SU-01 2) BAWASLU-PROV. SU-02 3) BAWASLU-PROV. SU-03 4) BAWASLU-PROV. SU-04 5) BAWASLU-PROV. SU-05 6) BAWASLU-PROV. SU-06 7) BAWASLU-PROV. SU-07 8) BAWASLU-PROV. SU-08 9) BAWASLU-PROV. SU-09 10) BAWASLU-PROV. SU-10 11) BAWASLU-PROV. SU-11 12) BAWASLU-PROV. SU-12 13) BAWASLU-PROV. SU-13 14) BAWASLU-PROV. SU-14 15) BAWASLU-PROV. SU-15 16) BAWASLU-PROV. SU-16 17) BAWASLU-PROV. SU-17 18) BAWASLU-PROV. SU-18 19) BAWASLU-PROV. SU-19 20) BAWASLU-PROV. SU-20 21) BAWASLU-PROV. SU-21 22) BAWASLU-PROV. SU-22 23) BAWASLU-PROV. SU-23 24) BAWASLU-PROV. SU-24 25) BAWASLU-PROV. SU-25 26) BAWASLU-PROV. SU-26 27) BAWASLU-PROV. SU-27 28) BAWASLU-PROV. SU-28 29) BAWASLU-PROV. SU-29 30) BAWASLU-PROV. SU-30 31) BAWASLU-PROV. SU-31 32) BAWASLU-PROV. SU-32 33) BAWASLU-PROV. SU-33
c. PROVINSI SUMATERA BARAT 1) Kabupaten Agam 2) Kabupaten Dharmasraya 3) Kabupaten Kepulauan Mentawai 4) Kabupaten Lima Puluh Kota 5) Kabupaten Padang Pariaman 6) Kabupaten Pasaman	c. BAWASLU PROV. SB 1) BAWASLU-PROV. SB-01 2) BAWASLU-PROV. SB-02 3) BAWASLU-PROV. SB-03 4) BAWASLU-PROV. SB-04 5) BAWASLU-PROV. SB-05 6) BAWASLU-PROV. SB-06

DAERAH	KODE
7) Kabupaten Pasaman Barat	7) BAWASLU-PROV. SB-07
8) Kabupaten Pesisir Selatan	8) BAWASLU-PROV. SB-08
9) Kabupaten Sijunjung	9) BAWASLU-PROV. SB-09
10) Kabupaten Solok	10) BAWASLU-PROV. SB-10
11) Kabupaten Solok Selatan	11) BAWASLU-PROV. SB-11
12) Kabupaten Tanah Datar	12) BAWASLU-PROV. SB-12
13) Kota Bukittinggi	13) BAWASLU-PROV. SB-13
14) Kota Padang	14) BAWASLU-PROV. SB-14
15) Kota Padangpanjang	15) BAWASLU-PROV. SB-15
16) Kota Pariaman	16) BAWASLU-PROV. SB-16
17) Kota Payakumbuh	17) BAWASLU-PROV. SB-17
18) Kota Sawahlunto	18) BAWASLU-PROV. SB-18
19) Kota Solok	19) BAWASLU-PROV. SB-19
d. PROVINSI JAMBI	d. BAWASLU PROV. JA
1) Kabupaten Batang Hari	1) BAWASLU-PROV. JA-01
2) Kabupaten Bungo	2) BAWASLU-PROV. JA-02
3) Kabupaten Kerinci	3) BAWASLU-PROV. JA-03
4) Kabupaten Merangin	4) BAWASLU-PROV. JA-04
5) Kabupaten Muaro Jambi	5) BAWASLU-PROV. JA-05
6) Kabupaten Sarolangun	6) BAWASLU-PROV. JA-06
7) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	7) BAWASLU-PROV. JA-07
8) Kabupaten Tanjung Timur	8) BAWASLU-PROV. JA-08
9) Kabupaten Tebo	9) BAWASLU-PROV. JA-09
10) Kota Jambi	10) BAWASLU-PROV. JA-10
11) Kota Sungai Penuh	11) BAWASLU-PROV. JA-11
e. PROVINSI RIAU	e. BAWASLU PROV. RI
1) Kabupaten Bengkalis	1) BAWASLU-PROV. RI-01
2) Kabupaten Indragiri Hilir	2) BAWASLU-PROV. RI-02
3) Kabupaten Indragiri Hulu	3) BAWASLU-PROV. RI-03
4) Kabupaten Kampar	4) BAWASLU-PROV. RI-04
5) Kabupaten Kuantan Singingi	5) BAWASLU-PROV. RI-05
6) Kabupaten Pelalawan	6) BAWASLU-PROV. RI-06
7) Kabupaten Rokan Hulu	7) BAWASLU-PROV. RI-07
8) Kabupaten Rokan Hilir	8) BAWASLU-PROV. RI-08
9) Kabupaten Siak	9) BAWASLU-PROV. RI-09
10) Kabupaten Kep. Meranti	10) BAWASLU-PROV. RI-10
11) Kota Pekanbaru	11) BAWASLU-PROV. RI-11
12) Kota Dumai	12) BAWASLU-PROV. RI-12
f. PROVINSI KEPULAUAN RIAU	f. BAWASLU PROV. KR
1) Kabupaten Karimun	1) BAWASLU-PROV. KR-01
2) Kabupaten Bintan (Kep. Riau)	2) BAWASLU-PROV. KR-02
3) Kabupaten Lingga	3) BAWASLU-PROV. KR-03
4) Kabupaten Natuna	4) BAWASLU-PROV. KR-04
5) Kabupaten Kep. Anambas	5) BAWASLU-PROV. KR-05
6) Kota Tanjungpinang	6) BAWASLU-PROV. KR-06
7) Kota Batam	7) BAWASLU-PROV. KR-07
g. PROVINSI SUMATERA SELATAN	g. BAWASLU PROV. SS
1) Kabupaten Banyuasin	1) BAWASLU-PROV. SS-01
2) Kabupaten Empat Lawang	2) BAWASLU-PROV. SS-02
3) Kabupaten Lahat	3) BAWASLU-PROV. SS-03
4) Kabupaten Muara Enim	4) BAWASLU-PROV. SS-04
5) Kabupaten Musi Banyuasin	5) BAWASLU-PROV. SS-05

DAERAH	KODE
6) Kabupaten Musi Rawas	6) BAWASLU-PROV. SS-06
7) Kabupaten Musi Rawas Utara	7) BAWASLU-PROV. SS-07
8) Kabupaten Ogan Ilir	8) BAWASLU-PROV. SS-08
9) Kabupaten Ogan Komering Ilir	9) BAWASLU-PROV. SS-09
10) Kabupaten Ogan Komering Ulu	10) BAWASLU-PROV. SS-10
11) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	11) BAWASLU-PROV. SS-11
12) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	12) BAWASLU-PROV. SS-12
13) Kabupaten Penakal Abab Lematang Ilir	13) BAWASLU-PROV. SS-13
14) Kota Lubuklinggau	14) BAWASLU-PROV. SS-14
15) Kota Pagar Alam	15) BAWASLU-PROV. SS-15
16) Kota Palembang	16) BAWASLU-PROV. SS-16
17) Kota Prabumulih	17) BAWASLU-PROV. SS-17
h. PROVINSI BANGKA BELITUNG	h. BAWASLU PROV. BB
1) Kabupaten Bangka	1) BAWASLU-PROV. BB-01
2) Kabupaten Bangka Barat	2) BAWASLU-PROV. BB-02
3) Kabupaten Bangka Selatan	3) BAWASLU-PROV. BB-03
4) Kabupaten Bangka Tengah	4) BAWASLU-PROV. BB-04
5) Kabupaten Belitung	5) BAWASLU-PROV. BB-05
6) Kabupaten Belitung Timur	6) BAWASLU-PROV. BB-06
7) Kota Pangkalpinang	7) BAWASLU-PROV. BB-07
i. PROVINSI BENGKULU	i. BAWASLU PROV. BE
1) Kabupaten Bengkulu Selatan	1) BAWASLU-PROV. BE-01
2) Kabupaten Bengkulu Tengah	2) BAWASLU-PROV. BE-02
3) Kabupaten Bengkulu Utara	3) BAWASLU-PROV. BE-03
4) Kabupaten Kaur	4) BAWASLU-PROV. BE-04
5) Kabupaten Kepahiang	5) BAWASLU-PROV. BE-05
6) Kabupaten Lebong	6) BAWASLU-PROV. BE-06
7) Kabupaten Mukomuko	7) BAWASLU-PROV. BE-07
8) Kabupaten Rejang Lebong	8) BAWASLU-PROV. BE-08
9) Kabupaten Seluma	9) BAWASLU-PROV. BE-09
10) Kota Bengkulu	10) BAWASLU-PROV. SU-10
j. PROVINSI LAMPUNG	j. BAWASLU PROV. LA
1) Kabupaten Lampung Barat	1) BAWASLU-PROV. LA-01
2) Kabupaten Lampung Selatan	2) BAWASLU-PROV. LA-02
3) Kabupaten Lampung Tengah	3) BAWASLU-PROV. LA-03
4) Kabupaten Lampung Timur	4) BAWASLU-PROV. LA-04
5) Kabupaten Lampung Utara	5) BAWASLU-PROV. LA-05
6) Kabupaten Mesuji	6) BAWASLU-PROV. LA-06
7) Kabupaten Pesawaran	7) BAWASLU-PROV. LA-07
8) Kabupaten Tanggamus	8) BAWASLU-PROV. LA-08
9) Kabupaten Tulang Bawang	9) BAWASLU-PROV. LA-09
10) Kabupaten Tulang Bawang Barat	10) BAWASLU-PROV. LA-10
11) Kabupaten Way Kanan	11) BAWASLU-PROV. LA-11
12) Kabupaten Pesisir Barat	12) BAWASLU-PROV. LA-12
13) Kabupaten Pringsewu	13) BAWASLU-PROV. LA-13
14) Kota Bandar Lampung	14) BAWASLU-PROV. LA-14
15) Kota Metro	15) BAWASLU-PROV. LA-15
k. PROVINSI BANTEN	k. BAWASLU PROV. BT
1) Kabupaten Lebak	1) BAWASLU-PROV. BT-01

DAERAH	KODE
2) Kabupaten Pandeglang 3) Kabupaten Serang 4) Kabupaten Tangerang 5) Kota Cilegon 6) Kota Serang 7) Kota Tangerang 8) Kota Tangerang Selatan	2) BAWASLU-PROV. BT-02 3) BAWASLU-PROV. BT-03 4) BAWASLU-PROV. BT-04 5) BAWASLU-PROV. BT-05 6) BAWASLU-PROV. BT-06 7) BAWASLU-PROV. BT-07 8) BAWASLU-PROV. BT-08
1. PROVINSI DKI JAKARTA 1) Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu 2) Kota Administratif Jakarta Barat 3) Kota Administratif Jakarta Pusat 4) Kota Administratif Jakarta Selatan 5) Kota Administratif Jakarta Timur 6) Kota Administratif Jakarta Utara	1. BAWASLU PROV. JK 1) BAWASLU-PROV. JK-01 2) BAWASLU-PROV. JK-02 3) BAWASLU-PROV. JK-03 4) BAWASLU-PROV. JK-04 5) BAWASLU-PROV. JK-05 6) BAWASLU-PROV. JK-06
m. PROVINSI JAWA BARAT 1) Kabupaten Bandung 2) Kabupaten Bandung Barat 3) Kabupaten Bekasi 4) Kabupaten Bogor 5) Kabupaten Ciamis 6) Kabupaten Cianjur 7) Kabupaten Cirebon 8) Kabupaten Garut 9) Kabupaten Indramayu 10) Kabupaten Karawang 11) Kabupaten Kuningan 12) Kabupaten Majalengka 13) Kabupaten Pangandaran 14) Kabupaten Purwakarta 15) Kabupaten Subang 16) Kabupaten Sukabumi 17) Kabupaten Sumedang 18) Kabupaten Tasikmalaya 19) Kota Bandung 20) Kota Banjar 21) Kota Bekasi 22) Kota Bogor 23) Kota Cimahi 24) Kota Cirebon 25) Kota Depok 26) Kota Sukabumi 27) Kota Tasikmalaya	m. BAWASLU PROV. JB 1) BAWASLU-PROV. JB-01 2) BAWASLU-PROV. JB-02 3) BAWASLU-PROV. JB-03 4) BAWASLU-PROV. JB-04 5) BAWASLU-PROV. JB-05 6) BAWASLU-PROV. JB-06 7) BAWASLU-PROV. JB-07 8) BAWASLU-PROV. JB-08 9) BAWASLU-PROV. JB-09 10) BAWASLU-PROV. JB-10 11) BAWASLU-PROV. JB-11 12) BAWASLU-PROV. JB-12 13) BAWASLU-PROV. JB-13 14) BAWASLU-PROV. JB-14 15) BAWASLU-PROV. JB-15 16) BAWASLU-PROV. JB-16 17) BAWASLU-PROV. JB-17 18) BAWASLU-PROV. JB-18 19) BAWASLU-PROV. JB-19 20) BAWASLU-PROV. JB-20 21) BAWASLU-PROV. JB-21 22) BAWASLU-PROV. JB-22 23) BAWASLU-PROV. JB-23 24) BAWASLU-PROV. JB-24 25) BAWASLU-PROV. JB-25 26) BAWASLU-PROV. JB-26 27) BAWASLU-PROV. JB-27
n. PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 1) Kabupaten Bantul 2) Kabupaten Gunung Kidul 3) Kabupaten Kulonprogo 4) Kabupaten Sleman 5) Kota Yogyakarta	n. BAWASLU PROV. YO 1) BAWASLU-PROV. YO-01 2) BAWASLU-PROV. YO-02 3) BAWASLU-PROV. YO-03 4) BAWASLU-PROV. YO-04 5) BAWASLU-PROV. YO-05
o. PROVINSI JAWA TENGAH 1) Kabupaten Banjarnegara 2) Kabupaten Banyumas	o. BAWASLU PROV. JT 1) BAWASLU-PROV. JT-01 2) BAWASLU-PROV. JT-02

DAERAH	KODE
3) Kabupaten Batang	3) BAWASLU-PROV. JT-03
4) Kabupaten Blora	4) BAWASLU-PROV. JT-04
5) Kabupaten Boyolali	5) BAWASLU-PROV. JT-05
6) Kabupaten Brebes	6) BAWASLU-PROV. JT-06
7) Kabupaten Cilacap	7) BAWASLU-PROV. JT-07
8) Kabupaten Demak	8) BAWASLU-PROV. JT-08
9) Kabupaten Grobogan	9) BAWASLU-PROV. JT-09
10) Kabupaten Jepara	10) BAWASLU-PROV. JT-10
11) Kabupaten Karanganyar	11) BAWASLU-PROV. JT-11
12) Kabupaten Kebumen	12) BAWASLU-PROV. JT-12
13) Kabupaten Kendal	13) BAWASLU-PROV. JT-13
14) Kabupaten Klaten	14) BAWASLU-PROV. JT-14
15) Kabupaten Kudus	15) BAWASLU-PROV. JT-15
16) Kabupaten Magelang	16) BAWASLU-PROV. JT-16
17) Kabupaten Pati	17) BAWASLU-PROV. JT-17
18) Kabupaten Pekalongan	18) BAWASLU-PROV. JT-18
19) Kabupaten Pemalang	19) BAWASLU-PROV. JT-19
20) Kabupaten Purbalingga	20) BAWASLU-PROV. JT-20
21) Kabupaten Purworejo	21) BAWASLU-PROV. JT-21
22) Kabupaten Rembang	22) BAWASLU-PROV. JT-22
23) Kabupaten Semarang	23) BAWASLU-PROV. JT-23
24) Kabupaten Sragen	24) BAWASLU-PROV. JT-24
25) Kabupaten Sukoharjo	25) BAWASLU-PROV. JT-25
26) Kabupaten Tegal	26) BAWASLU-PROV. JT-26
27) Kabupaten Temanggung	27) BAWASLU-PROV. JT-27
28) Kabupaten Wonogiri	28) BAWASLU-PROV. JT-28
29) Kabupaten Wonosobo	29) BAWASLU-PROV. JT-29
30) Kota Magelang	30) BAWASLU-PROV. JT-30
31) Kota Pekalongan	31) BAWASLU-PROV. JT-31
32) Kota Salatiga	32) BAWASLU-PROV. JT-32
33) Kota Semarang	33) BAWASLU-PROV. JT-33
34) Kota Surakarta	34) BAWASLU-PROV. JT-34
35) Kota Tegal	35) BAWASLU-PROV. JT-35
p. PROVINSI JAWA TIMUR	p. BAWASLU PROV. JI
1) Kabupaten Kabupaten Bangkalan	1) BAWASLU-PROV. JI-01
2) Kabupaten Banyuwangi	2) BAWASLU-PROV. JI-02
3) Kabupaten Blitar	3) BAWASLU-PROV. JI-03
4) Kabupaten Bojonegoro	4) BAWASLU-PROV. JI-04
5) Kabupaten Bondowoso	5) BAWASLU-PROV. JI-05
6) Kabupaten Gresik	6) BAWASLU-PROV. JI-06
7) Kabupaten Jember	7) BAWASLU-PROV. JI-07
8) Kabupaten Jombang	8) BAWASLU-PROV. JI-08
9) Kabupaten Kediri	9) BAWASLU-PROV. JI-09
10) Kabupaten Lumajang	10) BAWASLU-PROV. JI-10
11) Kabupaten Lamongan	11) BAWASLU-PROV. JI-11
12) Kabupaten Madiun	12) BAWASLU-PROV. JI-12
13) Kabupaten Magetan	13) BAWASLU-PROV. JI-13
14) Kabupaten Malang	14) BAWASLU-PROV. JI-14
15) Kabupaten Mojokerto	15) BAWASLU-PROV. JI-15
16) Kabupaten Nganjuk	16) BAWASLU-PROV. JI-16
17) Kabupaten Ngawi	17) BAWASLU-PROV. JI-17
18) Kabupaten Pacitan	18) BAWASLU-PROV. JI-18
19) Kabupaten Pamekasan	19) BAWASLU-PROV. JI-19
20) Kabupaten Pasuruan	20) BAWASLU-PROV. JI-20
21) Kabupaten Ponorogo	21) BAWASLU-PROV. JI-21
22) Kabupaten Probolinggo	22) BAWASLU-PROV. JI-22

DAERAH	KODE
23) Kabupaten Sampang 24) Kabupaten Sidoarjo 25) Kabupaten Situbondo 26) Kabupaten Sumenep 27) Kabupaten Trenggalek 28) Kabupaten Tuban 29) Kabupaten Tulungagung 30) Kota Batu 31) Kota Blitar 32) Kota Kediri 33) Kota Madiun 34) Kota Malang 35) Kota Mojokerto 36) Kota Pasuruan 37) Kota Probolinggo 38) Kota Surabaya	23) BAWASLU-PROV. JI-23 24) BAWASLU-PROV. JI-24 25) BAWASLU-PROV. JI-25 26) BAWASLU-PROV. JI-26 27) BAWASLU-PROV. JI-27 28) BAWASLU-PROV. JI-28 29) BAWASLU-PROV. JI-29 30) BAWASLU-PROV. JI-30 31) BAWASLU-PROV. JI-31 32) BAWASLU-PROV. JI-32 33) BAWASLU-PROV. JI-33 34) BAWASLU-PROV. JI-34 35) BAWASLU-PROV. JI-35 36) BAWASLU-PROV. JI-36 37) BAWASLU-PROV. JI-37 38) BAWASLU-PROV. JI-38
q. PROVINSI BALI 1) Kabupaten Badung 2) Kabupaten Bangli 3) Kabupaten Buleleng 4) Kabupaten Gianyar 5) Kabupaten Jembrana 6) Kabupaten Karangasem 7) Kabupaten Klungkung 8) Kabupaten Tabanan 9) Kota Denpasar	q. BAWASLU PROV. BA 1) BAWASLU-PROV. BA-01 2) BAWASLU-PROV. BA-02 3) BAWASLU-PROV. BA-03 4) BAWASLU-PROV. BA-04 5) BAWASLU-PROV. BA-05 6) BAWASLU-PROV. BA-06 7) BAWASLU-PROV. BA-07 8) BAWASLU-PROV. BA-08 9) BAWASLU-PROV. BA-09
r. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1) Kabupaten Bima 2) Kabupaten Dompu 3) Kabupaten Lombok Barat 4) Kabupaten Lombok Tengah 5) Kabupaten Lombok Timur 6) Kabupaten Lombok Utara 7) Kabupaten Sumbawa 8) Kabupaten Sumbawa Barat 9) Kota Bima 10) Kota Mataram	r. BAWASLU PROV. NB 1) BAWASLU-PROV. NB-01 2) BAWASLU-PROV. NB-02 3) BAWASLU-PROV. NB-03 4) BAWASLU-PROV. NB-04 5) BAWASLU-PROV. NB-05 6) BAWASLU-PROV. NB-06 7) BAWASLU-PROV. NB-07 8) BAWASLU-PROV. NB-08 9) BAWASLU-PROV. NB-09 10) BAWASLU-PROV. NB-10
s. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1) Kabupaten Alor 2) Kabupaten Belu 3) Kabupaten Ende 4) Kabupaten Flores Timur 5) Kabupaten Kupang 6) Kabupaten Lembata 7) Kabupaten Malaka 8) Kabupaten Manggarai 9) Kabupaten Manggarai Barat 10) Kabupaten Manggarai Timur 11) Kabupaten Ngada 12) Kabupaten Nagekeo 13) Kabupaten Rote Ndao 14) Kabupaten Sabu Raijua 15) Kabupaten Sikka 16) Kabupaten Sumba Barat	s. BAWASLU PROV. NT 1) BAWASLU-PROV. NT-01 2) BAWASLU-PROV. NT-02 3) BAWASLU-PROV. NT-03 4) BAWASLU-PROV. NT-04 5) BAWASLU-PROV. NT-05 6) BAWASLU-PROV. NT-06 7) BAWASLU-PROV. NT-07 8) BAWASLU-PROV. NT-08 9) BAWASLU-PROV. NT-09 10) BAWASLU-PROV. NT-10 11) BAWASLU-PROV. NT-11 12) BAWASLU-PROV. NT-12 13) BAWASLU-PROV. NT-13 14) BAWASLU-PROV. NT-14 15) BAWASLU-PROV. NT-15 16) BAWASLU-PROV. NT-16

DAERAH	KODE
17) Kabupaten Sumba Barat Daya 18) Kabupaten Sumba Tengah 19) Kabupaten Sumba Timur 20) Kabupaten Timor Tengah Utara 21) Kabupaten Timor Tengah Selatan 22) Kota Kupang	17) BAWASLU-PROV. NT-17 18) BAWASLU-PROV. NT-18 19) BAWASLU-PROV. NT-19 20) BAWASLU-PROV. NT-20 21) BAWASLU-PROV. NT-21 22) BAWASLU-PROV. NT-22
t. PROVINSI KALIMANTAN UTARA 1) Kabupaten Bulungan 2) Kabupaten Malinau 3) Kabupaten Nunukan 4) Kabupaten Tana Tidung 5) Kota Tarakan	t. BAWASLU PROV. KU 1) BAWASLU-PROV. KU-01 2) BAWASLU-PROV. KU-02 3) BAWASLU-PROV. KU-03 4) BAWASLU-PROV. KU-04 5) BAWASLU-PROV. KU-05
u. PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1) Kabupaten Bengkayang 2) Kabupaten Kapuas Hulu 3) Kabupaten Ketapang 4) Kabupaten Kayong Utara 5) Kabupaten Kubu Raya 6) Kabupaten Landak 7) Kabupaten Melawi 8) Kabupaten Mempawah 9) Kabupaten Sambas 10) Kabupaten Sanggau 11) Kabupaten Sintang 12) Kabupaten Sekadau 13) Kota Pontianak 14) Kota Singkawang	u. BAWASLU PROV. KB 1) BAWASLU-PROV. KB-01 2) BAWASLU-PROV. KB-02 3) BAWASLU-PROV. KB-03 4) BAWASLU-PROV. KB-04 5) BAWASLU-PROV. KB-05 6) BAWASLU-PROV. KB-06 7) BAWASLU-PROV. KB-07 8) BAWASLU-PROV. KB-08 9) BAWASLU-PROV. KB-09 10) BAWASLU-PROV. KB-10 11) BAWASLU-PROV. KB-11 12) BAWASLU-PROV. KB-12 13) BAWASLU-PROV. KB-13 14) BAWASLU-PROV. KB-14
v. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 1) Kabupaten Balangan 2) Kabupaten Banjar 3) Kabupaten Barito Kuala 4) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5) Kabupaten Hulu Sungai Tengah 6) Kabupaten Hulu Sungai Utara 7) Kabupaten Kotabaru 8) Kabupaten Tabalong 9) Kabupaten Tanah Bumbu 10) Kabupaten Tanah Laut 11) Kabupaten Tapin 12) Kota Banjarbaru 13) Kota Banjarmasin	v. BAWASLU PROV. KS 1) BAWASLU-PROV. KS-01 2) BAWASLU-PROV. KS-02 3) BAWASLU-PROV. KS-03 4) BAWASLU-PROV. KS-04 5) BAWASLU-PROV. KS-05 6) BAWASLU-PROV. KS-06 7) BAWASLU-PROV. KS-07 8) BAWASLU-PROV. KS-08 9) BAWASLU-PROV. KS-09 10) BAWASLU-PROV. KS-10 11) BAWASLU-PROV. KS-11 12) BAWASLU-PROV. KS-12 13) BAWASLU-PROV. KS-13
w. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1) Kabupaten Barito Selatan 2) Kabupaten Barito Timur 3) Kabupaten Barito Utara 4) Kabupaten Gunung Mas 5) Kabupaten Kapuas 6) Kabupaten Katingan 7) Kabupaten Kotawaringin Barat 8) Kabupaten Kotawaringin Timur 9) Kabupaten Lamandau 10) Kabupaten Seruyan 11) Kabupaten Sukamara	w. BAWASLU PROV. KT 1) BAWASLU-PROV. KT-01 2) BAWASLU-PROV. KT-02 3) BAWASLU-PROV. KT-03 4) BAWASLU-PROV. KT-04 5) BAWASLU-PROV. KT-05 6) BAWASLU-PROV. KT-06 7) BAWASLU-PROV. KT-07 8) BAWASLU-PROV. KT-08 9) BAWASLU-PROV. KT-09 10) BAWASLU-PROV. KT-10 11) BAWASLU-PROV. KT-11

DAERAH	KODE
12) Kabupaten Pulang Pisau 13) Kabupaten Murung Raya 14) Kota Palangka Raya	12) BAWASLU-PROV. KT-12 13) BAWASLU-PROV. KT-13 14) BAWASLU-PROV. KT-14
x. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1) Kabupaten Berau 2) Kabupaten Kutai Barat 3) Kabupaten Kutai Kartanegara 4) Kabupaten Kutai Timur 5) Kabupaten Paser 6) Kabupaten Penajam Paser Utara 7) Kabupaten Mahakam Ulu 8) Kota Balikpapan 9) Kota Bontang 10) Kota Samarinda	x. BAWASLU PROV. KI 1) BAWASLU-PROV. KI-01 2) BAWASLU-PROV. KI-02 3) BAWASLU-PROV. KI-03 4) BAWASLU-PROV. KI-04 5) BAWASLU-PROV. KI-05 6) BAWASLU-PROV. KI-06 7) BAWASLU-PROV. KI-07 8) BAWASLU-PROV. KI-08 9) BAWASLU-PROV. KI-09 10) BAWASLU-PROV. KI-10
y. PROVINSI SULAWESI UTARA 1) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2) Kabupaten Bolaang Mongondow 3) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 4) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 5) Kabupaten Kepulauan Sangihe 6) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 7) Kabupaten Kepulauan Talaud 8) Kabupaten Minahasa 9) Kabupaten Minahasa Selatan 10) Kabupaten Minahasa Tenggara 11) Kabupaten Minahasa Utara 12) Kota Bitung 13) Kota Kotamobagu 14) Kota Manado 15) Kota Tomohon	y. BAWASLU PROV. SA 1) BAWASLU-PROV. SA-01 2) BAWASLU-PROV. SA-02 3) BAWASLU-PROV. SA-03 4) BAWASLU-PROV. SA-04 5) BAWASLU-PROV. SA-05 6) BAWASLU-PROV. SA-06 7) BAWASLU-PROV. SA-07 8) BAWASLU-PROV. SA-08 9) BAWASLU-PROV. SA-09 10) BAWASLU-PROV. SA-10 11) BAWASLU-PROV. SA-11 12) BAWASLU-PROV. SA-12 13) BAWASLU-PROV. SA-13 14) BAWASLU-PROV. SA-14 15) BAWASLU-PROV. SA-15
z. PROVINSI SULAWESI TENGAH 1) Kabupaten Banggai 2) Kabupaten Banggai Kepulauan 3) Kabupaten Banggai Laut 4) Kabupaten Buol 5) Kabupaten Donggala 6) Kabupaten Morowali 7) Kabupaten Morowali Utara 8) Kabupaten Parigi Moutong 9) Kabupaten Poso 10) Kabupaten Sigi 11) Kota Palu 12) Kabupaten Tojo Una-Una 13) Kabupaten Toli-Toli	z. BAWASLU PROV. ST 1) BAWASLU-PROV. ST-01 2) BAWASLU-PROV. ST-02 3) BAWASLU-PROV. ST-03 4) BAWASLU-PROV. ST-04 5) BAWASLU-PROV. ST-05 6) BAWASLU-PROV. ST-06 7) BAWASLU-PROV. ST-07 8) BAWASLU-PROV. ST-08 9) BAWASLU-PROV. ST-09 10) BAWASLU-PROV. ST-10 11) BAWASLU-PROV. ST-11 12) BAWASLU-PROV. ST-12 13) BAWASLU-PROV. ST-13
aa. PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1) Kabupaten Bombana 2) Kabupaten Buton 3) Kabupaten Buton Selatan 4) Kabupaten Buton Tengah	aa. BAWASLU PROV. SG 1) BAWASLU-PROV. SG-01 2) BAWASLU-PROV. SG-02 3) BAWASLU-PROV. SG-03 4) BAWASLU-PROV. SG-04

DAERAH	KODE
5) Kabupaten Buton Utara 6) Kabupaten Kolaka 7) Kabupaten Kolaka Timur 8) Kabupaten Kolaka Utara 9) Kabupaten Konawe 10) Kabupaten Konawe Kepulauan 11) Kabupaten Konawe Selatan 12) Kabupaten Konawe Utara 13) Kabupaten Muna 14) Kabupaten Muna Barat 15) Kabupaten Wakatobi 16) Kota Bau-Bau 17) Kota Kendari	5) BAWASLU-PROV. SG-05 6) BAWASLU-PROV. SG-06 7) BAWASLU-PROV. SG-07 8) BAWASLU-PROV. SG-08 9) BAWASLU-PROV. SG-09 10) BAWASLU-PROV. SG-10 11) BAWASLU-PROV. SG-11 12) BAWASLU-PROV. SG-12 13) BAWASLU-PROV. SG-13 14) BAWASLU-PROV. SG-14 15) BAWASLU-PROV. SG-15 16) BAWASLU-PROV. SG-16 17) BAWASLU-PROV. SG-17
bb. PROVINSI SULAWESI BARAT 1) Kabupaten Majene 2) Kabupaten Mamasa 3) Kabupaten Mamuju 4) Kabupaten Mamuju Tengah 5) Kabupaten Mamuju Utara 6) Kabupaten Polewali Mandar	bb. BAWASLU PROV. SR 1) BAWASLU-PROV. SR-01 2) BAWASLU-PROV. SR-02 3) BAWASLU-PROV. SR-03 4) BAWASLU-PROV. SR-04 5) BAWASLU-PROV. SR-05 6) BAWASLU-PROV. SR-06
cc. PROVINSI SULAWESI SELATAN 1) Kabupaten Bantaeng 2) Kabupaten Barru 3) Kabupaten Bone 4) Kabupaten Bulukumba 5) Kabupaten Enrekang 6) Kabupaten Gowa 7) Kabupaten Jeneponto 8) Kabupaten Kepulauan Selayar 9) Kabupaten Luwu 10) Kabupaten Luwu Timur 11) Kabupaten Luwu Utara 12) Kabupaten Maros 13) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 14) Kabupaten Pinrang 15) Kabupaten Sidenreng Rappang 16) Kabupaten Sinjai 17) Kabupaten Soppeng 18) Kabupaten Takalar 19) Kabupaten Tana Toraja 20) Kabupaten Toraja Utara 21) Kabupaten Wajo 22) Kota Makassar 23) Kota Palopo 24) Kota Parepare	cc. BAWASLU PROV. SN 1) BAWASLU-PROV. SN-01 2) BAWASLU-PROV. SN-02 3) BAWASLU-PROV. SN-03 4) BAWASLU-PROV. SN-04 5) BAWASLU-PROV. SN-05 6) BAWASLU-PROV. SN-06 7) BAWASLU-PROV. SN-07 8) BAWASLU-PROV. SN-08 9) BAWASLU-PROV. SN-09 10) BAWASLU-PROV. SN-10 11) BAWASLU-PROV. SN-11 12) BAWASLU-PROV. SN-12 13) BAWASLU-PROV. SN-13 14) BAWASLU-PROV. SN-14 15) BAWASLU-PROV. SN-15 16) BAWASLU-PROV. SN-16 17) BAWASLU-PROV. SN-17 18) BAWASLU-PROV. SN-18 19) BAWASLU-PROV. SN-19 20) BAWASLU-PROV. SN-20 21) BAWASLU-PROV. SN-21 22) BAWASLU-PROV. SN-22 23) BAWASLU-PROV. SN-23 24) BAWASLU-PROV. SN-24
dd. PROVINSI GORONTALO 1) Kabupaten Boalemo 2) Kabupaten Bone Bolango 3) Kabupaten Gorontalo 4) Kabupaten Gorontalo Utara 5) Kabupaten Pohuwato 6) Kota Gorontalo	dd. BAWASLU PROV. GO 1) BAWASLU-PROV. GO-01 2) BAWASLU-PROV. GO-02 3) BAWASLU-PROV. GO-03 4) BAWASLU-PROV. GO-04 5) BAWASLU-PROV. GO-05 6) BAWASLU-PROV. GO-06

DAERAH	KODE
<p>ee. PROVINSI MALUKU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kabupaten Buru 2) Kabupaten Buru Selatan 3) Kabupaten Kepulauan Aru 4) Kabupaten Maluku Barat Daya 5) Kabupaten Maluku Tengah 6) Kabupaten Maluku Tenggara 7) Kabupaten Maluku Tenggara Barat 8) Kabupaten Seram Bagian Timur 9) Kabupaten Seram Bagian Barat 10) Kota Ambon 11) Kota Tual 	<p>ee. BAWASLU PROV. MA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BAWASLU-PROV. MA-01 2) BAWASLU-PROV. MA-02 3) BAWASLU-PROV. MA-03 4) BAWASLU-PROV. MA-04 5) BAWASLU-PROV. MA-05 6) BAWASLU-PROV. MA-06 7) BAWASLU-PROV. MA-07 8) BAWASLU-PROV. MA-08 9) BAWASLU-PROV. MA-09 10) BAWASLU-PROV. MA-10 11) BAWASLU-PROV. MA-11
<p>ff. PROVINSI MALUKU UTARA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kabupaten Halmahera Barat 2) Kabupaten Halmahera Tengah 3) Kabupaten Halmahera Utara 4) Kabupaten Halmahera Selatan 5) Kabupaten Kepulauan Sula 6) Kabupaten Halmahera Timur 7) Kabupaten Pulau Morotai 8) Kabupaten Pulau Taliabu 9) Kota Ternate 10) Kota Tidore Kepulauan 	<p>ff. BAWASLU PROV. MU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BAWASLU-PROV. MU-01 2) BAWASLU-PROV. MU-02 3) BAWASLU-PROV. MU-03 4) BAWASLU-PROV. MU-04 5) BAWASLU-PROV. MU-05 6) BAWASLU-PROV. MU-06 7) BAWASLU-PROV. MU-07 8) BAWASLU-PROV. MU-08 9) BAWASLU-PROV. MU-09 10) BAWASLU-PROV. MU-10
<p>gg. PROVINSI PAPUA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kabupaten Asmat 2) Kabupaten Biak Numfor 3) Kabupaten Boven Digoel 4) Kabupaten Deiyai 5) Kabupaten Dogiyai 6) Kabupaten Jayawijaya 7) Kabupaten Jayapura 8) Kabupaten Intan Jaya 9) Kabupaten Keerom 10) Kabupaten Kepulauan Yapen 11) Kabupaten Lanny Jaya 12) Kabupaten Mamberamo Raya 13) Kabupaten Mamberamo Tengah 14) Kabupaten Mappi 15) Kabupaten Merauke 16) Kabupaten Mimika 17) Kabupaten Nabire 18) Kabupaten Nduga 19) Kabupaten Paniai 20) Kabupaten Pegunungan Bintang 21) Kabupaten Puncak 22) Kabupaten Puncak Jaya 23) Kabupaten Sarmi 24) Kabupaten Supiori 25) Kabupaten Tolikara 26) Kabupaten Waropen 27) Kabupaten Yahukimo 28) Kabupaten Yalimo 29) Kota Jayapura 	<p>gg. BAWASLU PROV. PA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BAWASLU-PROV. PA-01 2) BAWASLU-PROV. PA-02 3) BAWASLU-PROV. PA-03 4) BAWASLU-PROV. PA-04 5) BAWASLU-PROV. PA-05 6) BAWASLU-PROV. PA-06 7) BAWASLU-PROV. PA-07 8) BAWASLU-PROV. PA-08 9) BAWASLU-PROV. PA-09 10) BAWASLU-PROV. PA-10 11) BAWASLU-PROV. PA-11 12) BAWASLU-PROV. PA-12 13) BAWASLU-PROV. PA-13 14) BAWASLU-PROV. PA-14 15) BAWASLU-PROV. PA-15 16) BAWASLU-PROV. PA-16 17) BAWASLU-PROV. PA-17 18) BAWASLU-PROV. PA-18 19) BAWASLU-PROV. PA-19 20) BAWASLU-PROV. PA-20 21) BAWASLU-PROV. PA-21 22) BAWASLU-PROV. PA-22 23) BAWASLU-PROV. PA-23 24) BAWASLU-PROV. PA-24 25) BAWASLU-PROV. PA-25 26) BAWASLU-PROV. PA-26 27) BAWASLU-PROV. PA-27 28) BAWASLU-PROV. PA-28 29) BAWASLU-PROV. PA-29

DAERAH	KODE
hh. PROVINSI PAPUA BARAT	hh. BAWASLU PROV. PB
1) Kabupaten Fakfak	1) BAWASLU-PROV. PB-01
2) Kabupaten Kaimana	2) BAWASLU-PROV. PB-02
3) Kabupaten Manokwari	3) BAWASLU-PROV. PB-03
4) Kabupaten Manokwari Selatan	4) BAWASLU-PROV. PB-04
5) Kabupaten Pegunungan Arfak	5) BAWASLU-PROV. PB-05
6) Kabupaten Maybrat	6) BAWASLU-PROV. PB-06
7) Kabupaten Raja Ampat	7) BAWASLU-PROV. PB-07
8) Kabupaten Sorong	8) BAWASLU-PROV. PB-08
9) Kabupaten Sorong Selatan	9) BAWASLU-PROV. PB-09
10) Kabupaten Tambrau	10) BAWASLU-PROV. PB-10
11) Kabupaten Teluk Bintuni	11) BAWASLU-PROV. PB-11
12) Kabupaten Teluk Wondama	12) BAWASLU-PROV. PB-12
13) Kota Sorong	13) BAWASLU-PROV. PB-13

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD